

BAB III

UPAYA *MULTI STAKEHOLDER* DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Pada Bab III akan dibahas berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Upaya ini melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki upaya penting dalam memberikan hak pendidikan anak *undocumented*. Pembahasan akan mencakup upaya dan kontribusi dari *stakeholder* primer dan sekunder serta kolaborasi *multistakeholder*.

3.1 Upaya Stakeholder Primer dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Stakeholder primer dalam konteks pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan secara langsung dan berpengaruh paling signifikan dalam program sanggar bimbingan. Selain itu *stakeholder* primer merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan operasional harian sanggar bimbingan, penerima manfaat dalam suatu program juga termasuk *stakeholder* primer pada sanggar bimbingan anak pekerja migran merupakan penerima manfaat, serta terdapat KBRI Kuala Lumpur yang representasi dari pemerintah Indonesia, lalu terdapat peranan orang tua sebagai pendukung utama. Guru dan relawan pengajar yang melakukan interaksi secara langsung dengan siswa

siswi sanggar bimbingan juga memiliki pengaruh terhadap pembelajaran sehari-hari. Sebagai aktor utama pihak-pihak tersebut memiliki fungsi yang memastikan operasional sanggar bimbingan berjalan lancar serta menjaga keberlangsungan pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder primer merupakan penentu penting karena berdampak langsung terhadap efektivitas program yang menjadi pembeda antara stakeholder sekunder yang merupakan pihak pendukung.¹¹¹

3.1.1 KBRI Kuala Lumpur

Upaya pemerintah sangat penting sebagai penjaga keberlangsungan program serta memberikan legitimasi agar sanggar bimbingan tetap bisa beroperasi sah secara hukum, selain itu KBRI Kuala Lumpur tidak hanya memberikan dana serta izin untuk mendirikan sanggar bimbingan, upaya dari KBRI Kuala Lumpur memberikan guru dan relawan yang telah melakukan pelatihan di bawah naungan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur agar kualitas pengajar untuk sanggar bimbingan terjaga. Sebagai *stakeholder* Primer Pemerintah Indonesia menjadi pihak yang bisa melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia demi memperjuangkan hak pendidikan anak-anak *undocumented*.¹¹²

Akses Pendidikan menjadi penting untuk anak *undocumented* karena pihak Malaysia melarang anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap untuk

¹¹¹ Sundari and Tiara Eka Pharama, "Stakeholders Dalam Pendidikan," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): 285–96.

¹¹² Faradila Aini, Nurhafid Ishari, and Ahmad Ihwanul Muttaqin, "Sustainability of Non-Formal Education for Indonesian Migrant Children," *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12445>.

bisa mengakses Pendidikan formal di Malaysia. Upaya dari pemerintah Indonesia melalui KBRI dan Lembaga terkait membantu menyediakan alternatif untuk anak-anak yang terhalang akses Pendidikan formal dengan cara menyediakan Pendidikan informal seperti sanggar bimbingan yang di resmikan pada tahun 2019.¹¹³ Selain itu pemerintah juga melakukan upaya agar pihak Malaysia mengakui dan mendukung program sanggar bimbingan agar bisa memberikan perlindungan hukum. Dengan diberikannya akses pendidikan terhadap anak-anak *undocumented* diharapkan bisa membangun kesadaran orang tua pekerja migran terkait pentingnya pendidikan anak yang berguna untuk masa depan dan terhindar dari resiko sosial seperti eksploitasi dan diskriminasi. Pemerintah terus mengupayakan akses pendidikan bagi anak pekerja migran karena bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak warga negara di luar negeri.¹¹⁴

Pada 2022 KBRI Kuala Lumpur telah berhasil mendirikan 32 sanggar bimbingan dengan 30 sanggar bimbingan setara Sekolah Dasar serta 2 sanggar bimbingan setara Sekolah Menengah Pertama.¹¹⁵ Pada saat itu KBRI terus mengupayakan untuk pengembangan sanggar bimbingan melalui diskusi lebih lanjut

¹¹³ Dahlia, "Sanggar Bimbingan Anak WNI Di Semenanjung Malaysia Berdiri," antaranews, 2019, <https://kl.antaranews.com/berita/5955/sanggar-bimbingan-anak-wni-di-semenanjung-malaysia-berdiri>.

¹¹⁴ Ranga Pandu Asmara Jingga, "Menjamin Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia," ANTARA News, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5124832/menjamin-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia?page=2>.

¹¹⁵ Sekolah Indonesia.edu.my, "KBRI Kuala Lumpur Selenggarakan Rapat Koordinasi Pendidikan Non Formal Tahun 2022 – Sekolah Indonesia Kuala Lumpur," Sekolah Indonesia.edu.my, 2022, <https://sekolahindonesia.edu.my/web2/%0Akabri-kuala-lumpur-selenggarakan%0Arapat-koordinasi-pendidikan-non%0Aformal-tahun-2022/>.

dengan *stakeholder*. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur untuk bisa menggapai anak-anak yang belum merasakan pendidikan berkualitas gencar mensosialisasikan beasiswa berupa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) pada tahun 2024. Beasiswa ADEM dibuat untuk bisa memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak yang sebelumnya telah bersekolah di sanggar bimbingan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih berkualitas di Indonesia.¹¹⁶

Selain memberikan beasiswa untuk anak-anak PMI, Pemerintah Indonesia juga memberikan pelatihan untuk tenaga guru dan pengelola Sanggar bimbingan karena berada langsung di bawah naungan KBRI Kuala Lumpur melalui SIKL. Guru dan pengelola diberikan pelatihan yang rutin dilakukan agar pelaksanaan sanggar bimbingan bisa terus berjalan lancar, adapun pelatihan yang diberikan terhadap guru dan pengelola sanggar bimbingan terkait pemahaman terkait jenis dan cara penilaian terhadap siswa agar lebih bersifat objektif, selain itu terdapat pemaparan terkait pengetahuan dan cara mengelola keuangan yang benar sesuai dengan konsep yang telah di ajarkan agar uang yang berada di sanggar bimbingan bisa berguna secara efektif. Pelatihan yang diberikan oleh pihak KBRI akan berguna untuk keberlangsungan

¹¹⁶ Pendidikan Non Formal Kuala Lumpur, “KBRI Kuala Lumpur Gencar Sosialisasi Beasiswa ADEM Di Malaysia.,” PNFKL.edu.my, 2024, <https://pnfkl.edu.my/kbri-kuala-lumpur-gencar-sosialisasi-beasiswa-adem-di-malaysia/>.

jalannya sanggar bimbingan dengan sistem yang dikelola dengan baik dan efektif akan memberikan efek jangka panjang positif.¹¹⁷

Salah satu kendala yang ada pada sanggar bimbingan adalah minim nya tenaga pengajar yang bisa memenuhi kebutuhan dengan siswa yang banyak, sehingga rasio antara siswa dengan guru tidak seimbang. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur membuat program KKN Internasional sebagai salah satu cara mengisi celah tenaga pengajar untuk sanggar bimbingan, Pada 14 Oktober 2025 KBRI Kuala Lumpur telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 43 perguruan tinggi dari Indonesia, dengan dibuatnya perjanjian tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang ada di Malaysia, terutama pada anak yang berstatus *undocumented*.¹¹⁸ Kerja sama yang dilakukan KBRI dengan perguruan tinggi Indonesia sebagai proyeksi komitmen pemerintah untuk terus menjamin hak pendidikan anak tidak terkecuali yang berada di luar negeri, hingga November 2025 KBRI dan 102 Universitas di Indonesia telah melakukan kerja sama selain itu dengan kerja sama tersebut bisa menumbuhkan dan

¹¹⁷ Pendidikan Non Formal Kuala Lumpur, “SIKL – SB Perkuat Misi Layanan Pendidikan Anak PMI,” PNFKL.edu.my, 2024, <https://pnfkl.edu.my/sikl-sb-perkuat-misi-layanan-pendidikan-anak-pmi/>.

¹¹⁸ Safira Amelia, “Umko Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Dengan Kбри Kuala Lumpur Untuk Perkuat Pendidikan Anak Pmi Di Malaysia,” umko, 2025, <https://www.umko.ac.id/2025/10/14/umko-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-dengan-kbri-kuala-lumpur-untuk-perkuat-pendidikan-anak-pmi-di-malaysia/>.

menciptakan program-program lanjutan yang efektif sehingga bisa menjangkau lebih jauh anak-anak pekerja migran Indonesia.¹¹⁹

Dari perspektif klasifikasi *stakeholder* Clarkson, KBRI Kuala Lumpur sebagai *stakeholder* primer karena tanpa adanya inisiatif dan dukungan dari perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia, program sanggar bimbingan tidak akan memiliki legitimasi dan sumber daya yang cukup untuk keberlangsungan sanggar bimbingan.¹²⁰ Perancangan standar operasional, fasilitasi pelatihan guru, dan dukungan kurikulum menunjukkan fungsi dari KBRI sebagai pemimpin fasilitatif dalam model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash.¹²¹ Negara bergerak sebagai fasilitator yang menjadi wadah untuk partisipasi seperti lembaga kemasyarakatan dan komunitas diaspora sehingga negara tidak menjadi pelaksana program yang bergerak sendiri.

3.1.2 Pengelola Sanggar Bimbingan

Pengelola sanggar bimbingan memiliki fungsi penting dalam keberlanjutan program, karena upaya yang dilakukan akan langsung berdampak pada penerima manfaat yaitu anak *undocumented*. Dalam pengelolaan sanggar bimbingan, pengurus tetap melakukan koordinasi dan laporan terkait perkembangan belajar mengajar kepada SIKL karena sanggar bimbingan tetap berada di bawah pengawasan. Tiap sanggar bimbingan memiliki kurikulum yang berbeda-beda, pengelola memiliki kendali penuh

¹¹⁹ Willy Haryono, "KBRI Kuala Lumpur Perluas Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Di Malaysia," Metro TV News, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQVoQ-kbri-kuala-lumpur-perluas-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-di-malaysia>.

¹²⁰ Clarkson, "A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance."

¹²¹ Ansell and Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice."hal 554.

dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar anak didik.¹²²

Guru merupakan salah satu *stakeholder* primer karena berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat yaitu anak-anak *undocumented*, tenaga pengajar seperti guru dan relawan pengajar harus menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif agar siswa dan siswi bisa mengikuti materi yang diberikan. Selain itu pendekatan secara personal akan berguna untuk membentuk karakter yang lebih aktif dan menumbuhkan keyakinan para siswa dan siswi untuk lebih giat dalam pembelajaran. Sebagian tenaga pengajar merupakan guru yang rutin mengikuti pelatihan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur agar kurikulum dan metode pembelajaran yang diberikan di tiap sanggar bimbingan merata secara kualitas.¹²³

Guru pada sanggar bimbingan jumlahnya terbatas sehingga untuk menutupi keterbatasan tenaga pengajar, guru melakukan upaya dalam merangkap beberapa tingkatan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilakukan. Guru merupakan aspek penting dalam pengelolaan sanggar bimbingan. Selain itu untuk memaksimalkan tenaga guru, guru yang ada di sanggar bimbingan menggunakan metode tematik dalam pembelajaran agar siswa didik bisa memahami secara menyeluruh.¹²⁴

¹²² Jingga, "Menjamin Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia."

¹²³ Aini, Ishari, and Muttaqin, "Sustainability of Non-Formal Education for Indonesian Migrant Children."

¹²⁴ Andini Rachmawati et al., "Pemberdayaan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Melalui Pendidikan Nonformal Di Sanggar Bimbingan Kepong," *Jurnal Sabangka Abdimas* 4, no. 04

Orang tua memiliki peranan yang penting karena bergerak sebagai pendukung keberlangsungan semangat anak untuk terus belajar, dukungan moral dari orang tua menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan sanggar bimbingan, tanpa adanya peranan orang tua yang supportif terhadap pendidikan anak, maka anak tersebut akan kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan, oleh karena itu peranan orang tua yang memberikan dukungan langsung terhadap penerima manfaat yaitu anak *undocumented* menjadi sangat penting dalam program jangka panjang sanggar bimbingan.¹²⁵

3.1.3 Pemerintah Malaysia

Dalam klasifikasi *stakeholder* yang dikemukakan oleh Clarkson, aktor primer merupakan pihak yang memiliki sifat esensial dalam keberlangsungan program sanggar bimbingan, seperti KBRI Kuala Lumpur, pengelola sanggar bimbingan, pemerintah Malaysia dan anak *undocumented* sebagai penerima manfaat.¹²⁶ Pemerintah Malaysia ditempatkan sebagai *stakeholder* primer karena tanpa izin dari pemerintah Malaysia, program sanggar bimbingan tidak dapat beroperasi sama sekali, karena wilayah Malaysia merupakan lokasi dari pelaksanaan program tersebut. Sehingga sifat esensial dari pemerintah Malaysia ditunjukkan oleh otoritasnya yang mencakup penegakan hukum seperti penertiban pekerja migran Indonesia, yang secara

(2025): 344–55, <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/view/1609%0Ahttps://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/download/1609/1719>.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Clarkson, “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance.”

signifikan mempengaruhi ruang Gerak, keamanan operasional, dan izin sanggar bimbingan. Walaupun pemerintah Malaysia tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dan operasional harian sanggar bimbingan, peran structural pemerintah Malaysia melalui kebijakan tetap esensial. Ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia terkait pembentukan sanggar bimbingan dengan ketentuan bahwa semua sanggar bimbingan harus terkoordinasi di bawah SIKL merupakan peranan penting untuk memberikan kepastian legalitas dan standarisasi pendidikan nonformal bagi anak migran. Pemerintah Malaysia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), namun berbanding terbalik dengan kebijakan regulasi keimigrasian yang membatasi anak-anak *undocumented* untuk bisa mengakses pendidikan formal di Malaysia.¹²⁷

Pasca pelaksanaan Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) 2.0 pada tahun 2023 Pemerintah Malaysia memberikan izin terhadap sanggar bimbingan yang beroperasi di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non-Formal (PKMB PNF).¹²⁸ Dengan legalitas yang dimiliki oleh sanggar bimbingan, anak-anak yang telah mengikuti ujian kesetaraan dan lulus dari PKMB PNF bisa mendapatkan ijazah resmi, sehingga nantinya bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia.

¹²⁷ Nurrahman and Triwahyuni, “Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan.”

¹²⁸ Firda Aulia Rachmasari, “PKBM PNF-KBRI Kuala Lumpur, Tempat Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Mengakses Pendidikan,” Good News From Indonesia, 2025, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/12/04/pkbn-pnf-kbri-kuala-lumpur-tempat-anak-anak-pekerja-migran-indonesia-mengakses-pendidikan>.

Keberadaan Pemerintah Malaysia yang merupakan *stakeholder* primer terlihat dari perannya yang membentuk regulasi dan kebijakan yang bisa memberikan peluang ataupun hambatan bagi sanggar bimbingan. Sehingga dalam upaya Indonesia untuk memenuhi hak pendidikan anak *undocumented* PMI memerlukan adanya negosiasi dalam batas-batas kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, sehingga diplomasi menjadi penting untuk mencegah adanya gangguan dalam pelaksanaan program sanggar bimbingan.

3.2 Upaya Stakeholder Sekunder dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Stakeholder sekunder merupakan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan sanggar bimbingan, *stakeholder* sekunder berperan sebagai pihak pendukung dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari terdapat andil dari *stakeholder* sekunder memberikan dukungan administratif, serta memberikan sumber daya yang berguna untuk kelangsungan operasional dari sanggar bimbingan. *Stakeholder* sekunder diisi oleh lembaga kemasyarakatan seperti PCIM dan PCINU, komunitas diaspora seperti PERMAI, IKABA, dan IMABA. Dengan adanya *stakeholder* sekunder yang melakukan kerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur bisa mendirikan sanggar bimbingan, selain itu berperan dalam memberi dukungan teknis, penghubung antara KBRI Kuala Lumpur dengan anak *undocumented*, dan sebagai pendamping sosial. *Stakeholder* sekunder memiliki peranan yang krusial dalam menjamin dukungan yang berkelanjutan terkait pendanaan, pelatihan sdm, dan sebagai

fasilitator dalam sanggar bimbingan, sehingga akses pendidikan untuk anak *undocumented* bisa terus berjalan secara optimal dan efektif.¹²⁹

3.2.1 Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan seperti Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCINU) melakukan upaya yang penting sebagai *stakeholder* sekunder. Kedua lembaga kemasyarakatan tersebut telah memberikan dukungan operasional langsung terhadap program sanggar bimbingan. Dengan adanya dukungan dari lembaga kemasyarakatan bisa mengatasi keterbatasan akses pendidikan formal di Semenanjung Malaysia. Oleh karena itu kontribusi yang diberikan oleh lembaga kemasyarakatan menopang keberlanjutan dari program sanggar bimbingan.

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang melakukan kolaborasi dengan KBRI Kuala Lumpur untuk mendirikan sanggar bimbingan, PCIM telah mendirikan tiga sanggar bimbingan yang berada di wilayah Kuala Lumpur yaitu Kampung Bandan, Kampung Baru, dan Intan Baiduri. PCIM memiliki fokus pada pemberian pelayanan pendidikan dasar untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kendala untuk mengakses pendidikan formal. Selain mendirikan sanggar bimbingan PCIM juga menyumbang tenaga pengajar yang berasal dari komunitas masyarakat Muhammadiyah setempat.

¹²⁹ Aranda and Nurhimiliah, "Tanggung Jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia."

Kolaborasi antara PCIM dan KBRI Kuala Lumpur efektif karena jaringan yang dimiliki komunitas luas hingga di tingkat akar rumput.¹³⁰

Tabel 3.1 Upaya PCIM dalam Sanggar Bimbingan

Tahun	Bentuk Upaya	Kontribusi
2021	Peresmian Sanggar Bimbingan Kampung Baru	Peresmian Sanggar Bimbingan Kampung Baru dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan Malaysia. ¹³¹
2021	Fasilitas Belajar	Penggalangan dana untuk kebutuhan 50 meja belajar pada sanggar bimbingan pasca Covid-19. ¹³²
2021	Penguatan kelembagaan sanggar bimbingan yang di naungi PCIM	Transisi dari TPA yang bersifat informal ke pendidikan berijazah. ¹³³
2022	Ekspansi Sanggar Bimbingan	Peresmian Sanggar Bimbingan Kepong sebagai SB kedua dengan siswa sebanyak 27 orang. SB Kepong di prioritaskan untuk anak-anak <i>undocumented</i> yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. ¹³⁴
2022	Penambahan SDM Pengajar	Program KKN yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto sehingga menambah tenaga pengajar 9 guru. ¹³⁵

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Afandi, "Ribuan Anak Migran Indonesia Tak Terjangkau Pendidikan Di Malaysia, Muhammadiyah Dirikan Sekolah," Muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/04/ribuan-anak-migran-indonesia-tak-terjangkau-pendidikan-di-malaysia-muhammadiyah-dirikan-sekolah/>.

¹³² Aanardianto, "Sanggar Bimbingan PCIM Malaysia Untuk Anak-Anak PMI Beroperasi Kembali," Muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/sanggar-bimbingan-pcim-malaysia-untuk-anak-anak-pmi-beroperasi-kembali/>.

¹³³ Aanardianto, "Muhammadiyah Di Malaysia Bukan Hanya Punya UMAM Tapi Juga PKBM," Muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/08/muhammadiyah-di-malaysia-bukan-hanya-punya-umam-tapi-juga-pkbm/>.

¹³⁴ Afandi, "Penuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Pekerja Migran, PCIM Malaysia Kembali Dirikan Sanggar Belajar," Muhammadiyah.or.id, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/penuhi-kebutuhan-pendidikan-anak-pekerja-migran-pcim-malaysia-kembali-dirikan-sanggar-belajar/>.

¹³⁵ Admin, "Tahun Ajaran Baru Di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Malaysia Hadirkan Guru Baru," Muhammadiyah.or.Id, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/08/tahun-ajaran-baru-di-sanggar-bimbingan-muhammadiyah-malaysia-hadirkan-guru-baru/>.

2022	Penguatan Keindonesiaan	Peserta didik SB Kampung Baru melakukan kunjungan ke KBRI Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. ¹³⁶
2022	Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor	PCIM melakukan kerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur terkait upaya penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berguna untuk anak <i>undocumentd</i> jika ingin pulang ke Indonesia. ¹³⁷
2023	PCIM Sebagai Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional	KKN yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak di SB Kepong dan UNIDA Gontor di SB Kampung Baru. ¹³⁸
2025	Penguatan Mental dan <i>Soft Skill</i>	Edukasi kepercayaan diri, komunikasi, dan kerja tim melalui metode interaktif di SB Aisyiyah Kampung Pandan. ¹³⁹
2025	Dorongan akses pendidikan inklusif	Memprioritaskan anak <i>undocumented</i> dan mempermudah akses untuk masuk sanggar bimbingan. ¹⁴⁰

Sumber: muhammadiyah.or.id

Tabel diatas menunjukkan upaya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dalam sanggar bimbingan yang berkelanjutan, seperti pendirian infrastruktur dasar pada tahun 2021, lalu penguatan sumber daya manusia dan ekspansi sanggar

¹³⁶ Admin, "Kunjungan Ke KBRI Kuala Lumpur, Peserta Didik Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Malaysia Dikuatkan Keindonesiaannya," Muhammadiyah.or.id, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/08/kunjungan-ke-kbri-kuala-lumpur-peserta-didik-sanggar-bimbingan-muhammadiyah-malaysia-dikuatkan-ke-indonesiaannya/>.

¹³⁷ Admin, "Gerakan Dakwah Global Muhammadiyah Melalui PCIM Dan PCIA," Muhammadiyah.or.Id, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/10/gerakan-dakwah-global-muhammadiyah-melalui-pcim-dan-pcia/>.

¹³⁸ Aanardianto, "Keberadaan PCIM Malaysia Sebagai Tumpuan Program PTMA Dan Duta Indonesia Di Luar Negeri," Muhammadiyah.or.id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/keberadaan-pcim-malaysia-sebagai-tumpuan-program-ptma-dan-duta-indonesia-di-luar-negeri/>.

¹³⁹ Admin, "APIK PTMA Ajak Siswa Di Malaysia Bangun Mental Dan Spirit Positif," Muhammadiyah.or.id, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2025/05/apik-ptma-ajak-siswa-di-malaysia-bangun-mental-dan-spirit-positif/>.

¹⁴⁰ Admin, "PP 'Aisyiyah Dorong Kemudahan Akses Belajar Bagi Anak-Anak PMI Di Malaysia,'" Muhammadiyah.or.id, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2025/05/pp-aisyiyah-dorong-kemudahan-akses-belajar-bagi-anak-anak-pmi-di-malaysia/>.

bimbingan pada tahun 2022, hingga pada tahun 2023 memperluas jaring internasional yang dilakukan dengan universitas-universitas di Indonesia.¹⁴¹ Kontribusi yang dilakukan oleh PCIM sebagai mitra strategis KBRI tidak terbatas pada sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai legitimasi sosial dan keberlanjutan program melalui jaringan global Muhammadiyah. Pola tersebut menunjukkan *stakeholder* sekunder yang penting dalam keberhasilan sanggar bimbingan.

Upaya yang dilakukan oleh PCIM dibagi menjadi dua fase yaitu fase pertama 2021 hingga 2022 saat sanggar bimbingan yang di kelola oleh PCIM diresmikan dengan memiliki izin oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, penggunaan kurikulum Indonesia memberikan adanya jaminan ijazah yang dapat diakui oleh sistem pendidikan nasional Indonesia sehingga saat anak didik sanggar bimbingan telah lulus bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia dengan strata yang sama.¹⁴² Pada fase ini sanggar bimbingan didorong untuk menjadi lembaga pendidikan non formal yang terstruktur dan terkoordinasi, selain itu ekspansi jumlah sanggar bimbingan ke berbagai wilayah menunjukkan adanya perencanaan pendidikan yang berkelanjutan.¹⁴³ Pada fase kedua yang terjadi pada 2023 hingga 2025 PCIM memperkuat keberlanjutan program sanggar bimbingan dengan jejaring yang lebih luas seperti program

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Aanardianto, "Sanggar Bimbingan PCIM Malaysia Untuk Anak-Anak PMI Beroperasi Kembali."

¹⁴³ Afandi, "Penuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Pekerja Migran, PCIM Malaysia Kembali Dirikan Sanggar Belajar."

pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan dengan universitas-universitas di Indonesia untuk menunjang tenaga pengajar.

Tabel 3.2 Upaya PCINU dalam Sanggar Bimbingan

Tahun	Bentuk Upaya	Kontribusi
2019	Pendirian Sanggar Bimbingan dan Kurikulum	PCINU mendirikan SB Mulia Gombak dengan izin serta dukungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. ¹⁴⁴ Serta workshop kurikulum dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. ¹⁴⁵
2021	Program Dokumen Kelahiran Gratis	PCINU melakukan kerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur dalam program Dokumen Kelahiran Gratis yang berguna bagi siswa SB Sungai Mulia yang tidak memiliki dokumen agar dapat melanjutkan pendidikan. ¹⁴⁶
2022	Peresmian SBSMP An Nahdloh	Keberlanjutan Sanggar Bimbingan Sungai Mulia hingga jenjang SMP. ¹⁴⁷
2024	MoU dengan UNISMA dan Program “Sekolah Asuh”	“Sekolah Asuh” merupakan program yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak PMI, selain itu pada program tersebut pihak Unisma akan bertindak sebagai mitra pendamping SDM dan kurikulum. ¹⁴⁸
2025	Pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah	Sanggar Bimbingan Jalan Kebun tidak hanya dikembangkan sebagai sarana pendidikan akademik, namun juga sebagai sarana pendidikan ideologis NU seperti Ahlussunnah wal Jamaah, kebangsaan, dan akhlak. ¹⁴⁹

¹⁴⁴ Dahlia, “Sanggar Bimbingan Anak WNI Di Semenanjung Malaysia Berdiri.”

¹⁴⁵ Fathoni Ahmad, “Muslimat Dan KMNU Malaysia Rancang Kurikulum Sanggar Belajar,” no.or.id, 2019, <https://nu.or.id/internasional/muslimat-dan-kmnu-malaysia-rancang-kurikulum-sanggar-belajar-mhohw>.

¹⁴⁶ Fathoni Ahmad, “Muslimat NU Malaysia Selenggarakan Program Dokumen Kelahiran Gratis,” no.or.id, 2021, <https://www.nu.or.id/internasional/muslimat-nu-malaysia-selenggarakan-program-dokumen-kelahiran-gratis-x0VH3>.

¹⁴⁷ Aziz, “PCINU Malaysia Resmikan Sanggar Belajar Setaraf SMP,” nu.or.id, 2022, <https://www.nu.or.id/internasional/pcinu-malaysia-resmikan-sanggar-belajar-setaraf-smp-h7cdv>.

¹⁴⁸ Muhammad Syakir NF, “PCINU Malaysia Dan Unisma Teken Kerja Sama Bangun Pendirian Sanggar Bimbingan Baru Dan Sekolah Asuh,” no.or.id, 2024, <https://www.nu.or.id/internasional/pcinu-malaysia-dan-unisma-teken-kerja-sama-bangun-pendirian-sanggar-bimbingan-baru-dan-sekolah-asuh-ajslp>.

¹⁴⁹ M. Irwan Zamroni Ali, “Sanggar Bimbingan Jalan Kebun, Cetak Kader NU Berkarakter Di Negeri Jiran,” NU Online (nu, 2025), <https://nu.or.id/internasional/sanggar-bimbingan-jalan-kebun-cetak-kader-nu-berkarakter-di-negeri-jiran-3S2K3>.

Sumber: nu.or.id

Tabel di atas menunjukkan keberlanjutan upaya yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dari pendirian sanggar bimbingan pertama pada tahun 2019, pemenuhan hak administratif anak pada tahun 2021, lalu melakukan ekspansi ke jenjang SMP pada tahun 2022, hingga menerapkan pendidikan dan penguatan karakter keagamaan NU pada tahun 2025.¹⁵⁰ Upaya yang dilakukan oleh PCINU melengkapi PCIM seperti legitimasi hukum anak dengan program dokumen kelahiran gratis menciptakan kerja sama saling melengkapi dalam program sanggar bimbingan. Pola tersebut memperkuat posisi organisasi kemasyarakatan sebagai pilar operasional Indonesia di Malaysia.

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) merupakan salah satu mitra kolaborasi KBRI Kuala Lumpur yang juga termasuk dalam *stakeholder* sekunder, PCINU telah mengelola 11 sanggar bimbingan yang tersebar di wilayah Malaysia. Peranan dari PCINU dalam sanggar bimbingan sebagai pengelola, penyedia tenaga pengajar, menyediakan fasilitas pendidikan, dan menjalankan program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Indonesia.¹⁵¹ PCINU telah berhasil mengembangkan sanggar bimbingan Sungai Mulia yang semulanya hanya untuk tingkat dasar hingga ke tingkat SMP, selain itu PCINU terus mengembangkan inovasi agar program sanggar

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

bimbingan bisa berkelanjutan seperti pembangunan asrama, koperasi, dan ruang belajar agar mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sanggar bimbingan.¹⁵²

Sebagai *stakeholder* sekunder, PCIM dan PCINU memberikan kontribusi secara nyata melalui daya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan. Pengelolaan relawan, fasilitas, dan jejaring donatur yang dilakukan oleh kedua lembaga kemasyarakatan menunjukkan bahwa keberhasilan program bergantung pada upaya-upaya PCIM dan PCINU dalam mengisi celah yang tidak dapat ditutup oleh KBRI Kuala Lumpur.

3.2.2 Komunitas Diaspora

Komunitas diaspora Indonesia yang ada di Malaysia turut melakukan upaya dalam meningkatkan pendidikan untuk anak *undocumented*. Komunitas diaspora yang merupakan *grassroots* melihat permasalahan anak *undocumented* tidak bisa mengakses pendidikan formal di Semenanjung Malaysia, sehingga melakukan inisiatif untuk bergerak mendirikan pembelajaran nonformal sebagai wadah untuk pendidikan anak *undocumented*. Selain itu komunitas diaspora merupakan pihak yang menjembatani komunikasi antara KBRI Kuala Lumpur dan keluarga migran di lapangan. Keberadaan Komunitas seperti Pertumbuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI), Ikatan Alumni Bata-Bata (IKABA), dan Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) memberikan

¹⁵² Aziz. 2022. "PCINU Malaysia Resmikan Sanggar Belajar Setaraf SMP." <https://www.nu.or.id/internasional/pcinu-malaysia-resmikan-sanggar-belajar-setaraf-smp-h7cdv>.

kontribusi dalam mendata calon siswa-siswi sanggar bimbingan, menyediakan tenaga pengajar relawan, hingga menyediakan fasilitas belajar yang memadai.¹⁵³

Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) merupakan komunitas diaspora Indonesia yang berada di Penang, PERMAI merupakan wadah bagi pekerja migran Indonesia yang memiliki fokus pada bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia di wilayah tersebut. Terdapat berbagai lapisan masyarakat yang ada di PERMAI seperti pekerja migran baik yang ilegal ataupun legal.¹⁵⁴ PERMAI telah berhasil mendirikan sanggar bimbingan yang pertama yaitu SB Permai Penang pada tahun 2021, setelah menjalin komunikasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur. Setelah berhasil mendirikan sanggar bimbingan di tahun 2021, PERMAI memperluas cakupan dengan mendirikan cabang sanggar bimbingan di daerah Kulim, Kedah pada tahun 2022. Program yang ditawarkan oleh Sanggar Bimbingan Permai adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Atas (SMP). PERMAI melakukan kerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang berada di universitas di Malaysia, serta mahasiswa Indonesia yang melakukan KKN-Luar Negeri untuk menjadi relawan tenaga pengajar di sanggar bimbingan.¹⁵⁵

¹⁵³ Jannati et al., "Pentingnya Pendidikan Bagi Stateless Children Di Sanggar Bimbingan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI)."

¹⁵⁴ Anggia Prasanti et al., "Upaya Dan Hambatan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Dalam Mewujudkan Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2023): 1–11.

¹⁵⁵ PERMAI, "Sanggar Bimbingan PERMAI - PERMAI Penang," accessed December 6, 2025, <https://permai.my.id/elementor-170/>.

IKABA dan IMABA merupakan komunitas yang berasal dari alumni dan mahasiswa dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di Pamekasan, Madura. IKABA dan IMABA aktif dalam meningkatkan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia.¹⁵⁶ IKABA dan IMABA pertama kali mendirikan sanggar bimbingan At-Tanzil yang berada di Bangi pada tahun 2020, dan telah berhasil mendirikan 15 sanggar bimbingan pada tahun 2024 yang tersebar di Selangor, Malaysia. IKABA dan IMABA turut menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Sanggar Bimbingan At-Tanzil. Fokus program pendidikan yang dilakukan oleh Sanggar Bimbingan At-Tanzil adalah literasi, Al-Qur'an, dan karakter nasionalisme.¹⁵⁷

3.2.3 Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan *stakeholder* sekunder karena memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar sanggar bimbingan, persepsi masyarakat lokal terhadap anak *undocumented* akan memengaruhi aksesibilitas dan partisipasi siswa terhadap program sanggar bimbingan, persepsi yang buruk seperti “orang asing berbahaya” tentunya akan menghambat kegiatan operasional sanggar bimbingan karena terdapat stigma buruk dan diskriminasi yang menyebabkan ketakutan terhadap anak-anak

¹⁵⁶ Virna P Setyorini, “IKABA IMABA Malaysia Wisuda 19 Siswa Sanggar Bimbingan AT-TANZIL,” ANTARA News, 2023, <https://kl.antaranews.com/berita/15732/ikaba-imaba-malaysia-wisuda-19-siswa-sanggar-bimbingan-at-tanzil>.

¹⁵⁷ Misbahul, “IKABA & IMABA Malaysia Kembali Meresmikan Sanggar Bimbingan At-Tanzil,” Kompasiana, 2024, <https://www.kompasiana.com/misbahulmunir3231/66ae628234777c1ef46f23d2/ikaba-imaba-malaysia-kembali-meresmikan-sanggar-bimbingan-at-tanzil>.

migran, namun dengan dukungan dan persepsi baik yang diberikan masyarakat lokal akan mendukung lingkungan yang baik dan memberikan dukungan moral terhadap anak-anak migran untuk semangat dalam menggapai pendidikan.¹⁵⁸

Xenophobia terhadap migran di Malaysia sering muncul dalam bentuk diskriminasi sosial dan razia imigrasi. Anak PMI kerap menghadapi stigma sebagai ancaman sosial yang memperburuk isolasi mereka di masyarakat Malaysia. Urgensi memerangi xenophobia perlu dilakukan melalui edukasi publik dengan cara mengubah persepsi masyarakat lokal dari “ancaman” menjadi kontributor ekonomi, sehingga menciptakan dukungan moral.¹⁵⁹

3.3 Kolaborasi *Multistakeholder* dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak *Undocumented*

Keberhasilan program sanggar bimbingan untuk akses pendidikan anak *undocumented* yang menghadapi keterbatasan dipengaruhi oleh kolaborasi antar berbagai *stakeholder* yang saling berkaitan di dalamnya. Dengan dilakukannya kerja sama akan menyelesaikan permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan fasilitas belajar, dan minimnya tenaga pengajar. Upaya antar *stakeholder* akan berpengaruh dalam keberlangsungan suatu program, Freeman menyebutkan bahwa “*Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the*

¹⁵⁸ Prasanti et al., “Upaya Dan Hambatan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Dalam Mewujudkan Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia.”

¹⁵⁹ Admin, “Rethinking Our Treatment of Foreign Workers and Combating Xenophobia in Malaysia,” *malaysiagazette*, 2025, <https://malaysiagazette.com/2025/01/29/rethinking-our-treatment-of-foreign-workers-and-combating-xenophobia-in-malaysia/>.

organizational objectives.”¹⁶⁰ Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kepentingan internal, namun juga dipengaruhi oleh hubungan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan dilibatkannya pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan komunitas diaspora akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. Pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang memberikan regulasi dan dukungan finansial, dan pihak pendukung dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan bahan belajar, tenaga pengajar, dan menyediakan fasilitas untuk belajar.

Untuk memberikan pendidikan terhadap anak *undocumented Multistakeholder* melakukan upaya kolaboratif agar program sanggar bimbingan berjalan efektif dan berkelanjutan. Peneliti menggunakan konsep tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, yang terdiri dari empat elemen utama yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.¹⁶¹ Konsep tata kelola kolaboratif digunakan untuk melengkapi klasifikasi Freeman dalam dinamika proses kolaborasi primer (KBRI dan Pengelola Sanggar Bimbingan) dan sekunder (Lembaga Kemasyarakatan, Komunitas Diaspora, Pemerintah Malaysia dan Masyarakat Lokal) untuk mengatasi hak pendidikan anak *undocumented* PMI.

¹⁶⁰ . E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston, MA: Pitman, 1984), hal. 46.

¹⁶¹ Chris Ansell and Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): hal 550, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

3.3.1 Kondisi Awal

Menurut UN DESA pada tahun 2024 terdapat 1,8 juta migran Indonesia yang berada di Malaysia,¹⁶² selain itu PMI yang ada di Malaysia dibagi menjadi 2 yaitu legal dan ilegal, fenomena anak *undocumented* dipicu oleh status nonprosedural orang tua dan pernikahan siri.¹⁶³ Anak *undocumented* terancam tidak bisa mengakses pendidikan dikarenakan adanya reservasi Malaysia terhadap pasal 28 Konvensi Hak Anak yang memberikan pendidikan gratis dan wajib hanya kepada anak warga negara Malaysia, bukan untuk semua anak yang ada di wilayahnya.¹⁶⁴

Kondisi awal kolaborasi ditandai oleh permasalahan minimnya pendidikan untuk anak *undocumented* di Semenanjung Malaysia, berbeda dengan wilayah Malaysia Timur yang memiliki *Community Learning Center* untuk mengatasi isu Pendidikan anak *undocumented*. Pemerintah Malaysia lebih dulu memberikan izin pendirian komunitas pembelajaran di Sabah dan Sarawak pada tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak pekerja migran yang bekerja di ladang.¹⁶⁵ Urgensi pendidikan untuk anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia mendorong kesadaran kolektif dengan dilakukannya inisiasi antara KBRI Kuala Lumpur dan

¹⁶² International Organization for Migration IOM, “Key Migration Statistics Immigration & Emigration,” Migration Data Portal, 2025, https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2024.

¹⁶³ Santoso, “Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented Yang Lahir Di Malaysia.”

¹⁶⁴ Noorani, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak.”

¹⁶⁵ Rusman. “Sekolah Anak-Anak TKI Di Sabah, Malaysia Dikunjungi Pegiat HAM AS.” *antaranews*, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1281421/sekolah-anak-anak-tki-di-sabahmalaysia-dikunjungi-pegiat-ham-as>.

PCINU pada tahun 2019 untuk mendirikan pendidikan non formal sebagai solusi sementara.

Adanya kepentingan yang sama mendorong Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) menunjukkan komitmen untuk mengupayakan pendidikan yang merupakan hak pada setiap anak.¹⁶⁶ Kondisi yang terjadi pada isu anak *undocumented* menciptakan landasan awal kolaborasi untuk menangani masalah bersama seperti kenaikan kebutuhan pendidikan pasca pandemi Covid-19 yang mendorong kerja sama dengan KBRI sebagai penengah awal.

Sebaran sanggar bimbingan di Malaysia berada di lokasi-lokasi yang memiliki konsentrasi pekerja migran tinggi di dalamnya seperti Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Pekerja migran Indonesia cenderung menempati wilayah yang ramai seperti daerah industri dan ibu kota negara karena pada wilayah tersebut terdapat banyak kebutuhan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi penyebaran sanggar bimbingan pada suatu wilayah ditinjau dari akses infrastruktur pendidikan nonformal dan pendanaan dari pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan sekitar. Selain itu faktor dukungan regulasi dan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia juga berpengaruh dalam pembuatan suatu sanggar bimbingan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Indonesia Dan Timor Leste Perkuat Sinergi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.”

¹⁶⁷ Redaksi Suara Muda, “Sanggar Bimbingan Dan Nasib Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Semenanjung Malaysia.”

Dalam pelaksanaannya pembelajaran yang dilakukan di sanggar bimbingan menggunakan ruang-ruang sederhana seperti rumah yang di manfaatkan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Penggunaan ruang-ruang sederhana dikarenakan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengelola sanggar bimbingan sehingga masih menggunakan fasilitas seadanya. Selain itu terdapat keterbatasan tenaga pengajar yang memaksa seorang guru merangkap berbagai tingkatan kelas secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu.¹⁶⁸

3.3.2 Desain Institusional

Desain institusional kolaborasi multistakeholder sanggar bimbingan ditandai dengan adanya kerja sama antara KBRI Kuala Lumpur dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti PCINU yang telah berhasil mendirikan 11 sanggar bimbingan dan PCIM yang telah berhasil mendirikan tiga sanggar bimbingan yang berada di Kampun Bandan, Kampung Baiduri, dan Intan Baiduri.¹⁶⁹ KBRI Kuala Lumpur telah melakukan partisipasi dengan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada sanggar bimbingan, sementara PCINU dan PCIM menyediakan tenaga pengajar relawan dan kebutuhan sarana dan prasarana.¹⁷⁰

Dengan dilakukannya kerja sama antara KBRI Kuala Lumpur sebagai *stakeholder* primer dengan lembaga kemasyarakatan sebagai *stakeholder* sekunder

¹⁶⁸ Moh. Wais Al Qorni, "Mendidik Dalam Keterbatasan Kiprah Sanggar Bimbingan At-Tanzil Bersama PKN Internasional Malaysia," Limadetik.com, 2025, <https://limadetik.com/mendidik-dalam-keterbatasan-kiprah-sanggar-bimbingan-at-tanzil-bersama-pkn-internasional-malaysia/>.

¹⁶⁹ Ilham, "Muhammadiyah Malaysia Dirikan Sanggar Bimbingan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran."

¹⁷⁰ Aziz, "PCINU Malaysia Resmikan Sanggar Belajar Setaraf SMP."

pada sanggar bimbingan dapat memperoleh ruang belajar yang sederhana namun cukup untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar. Selain itu kolaborasi yang dilakukan oleh kedua *stakeholder* membantu dalam perancangan kurikulum yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa didik serta mengembangkan teknik pembelajaran agar lebih efektif termasuk metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Dengan adanya kolaborasi berbagai *stakeholder* mempermudah monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan karena saling menjaga keberlangsungan sanggar bimbingan, sehingga kualitas setiap sanggar bimbingan bisa terjaga dengan baik.¹⁷¹

Kolaborasi antara KBRI Kuala Lumpur dan Indonesia Diaspora Network (IDN) menghasilkan program dalam bentuk "Orang Tua Asuh". Program tersebut dibuat karena terdapat anak didik sanggar bimbingan yang orang tuanya kurang mampu dalam membayar iuran rutin, dengan adanya program tersebut biaya yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua anak didik sanggar bimbingan di tanggung oleh program Orang Tua Asuh. Dengan dibuatnya program Orang Tua Asuh permasalahan finansial yang di alami pekerja migran Indonesia untuk anak-anaknya dalam mengakses pendidikan bisa tetap berjalan¹⁷²

Kerjasama dengan pemerintah Malaysia dilakukan lewat pengakuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan NonFormal (PKMB PNF) memperkuat

¹⁷¹ Jingga, "Menjamin Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia."

¹⁷² Haryono, "KBRI Kuala Lumpur Perluas Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Di Malaysia."

legitimasi untuk memperluas sanggar bimbingan.¹⁷³ Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan ekspansi sanggar bimbingan pada tahun 2022 terdapat 22 menjadi 64 sanggar bimbingan pada tahun 2025.

Indonesia dan Malaysia telah melaksanakan *Annual Consultation meeting* ke 13 yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pada tahun 2025. Pertemuan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas stabilitas Kawasan, hubungan bilateral, dan terdapat pembahasan terkait perlindungan migran. Pendidikan anak pekerja migran merupakan salah satu isu prioritas yang dibahas, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan kerja sama dibidang Pendidikan untuk anak PMI yang ada di Malaysia, dari diskusi yang telah dilaksanakan, terdapat hasil yang menekankan untuk pendirian-pendirian *Community Learning Center* di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak untuk memperkuat akses Pendidikan anak PMI *undocumented*.¹⁷⁴

3.3.3 Kepemimpinan Fasilitatif

KBRI Kuala Lumpur sebagai pemimpin fasilitator utama dalam kolaborasi *Multistakholder* sanggar bimbingan membangun kepercayaan melalui adanya pelatihan guru sanggar bimbingan, serta melakukan mediasi dengan otoritas Malaysia

¹⁷³ Rachmasari, “PKBM PNF-KBRI Kuala Lumpur, Tempat Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Mengakses Pendidikan.”

¹⁷⁴ Humas, “Annual Consultation Meeting Indonesia-Malaysia: Komitmen Kerja Sama, Perdamaian, Dan Perlindungan Migran,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025, <https://setkab.go.id/annual-consultation-meeting-indonesia-malaysia-komitmen-kerja-sama-perdamaian-dan-perlindungan-migran/>.

untuk izin PKMB Pendidikan Nonformal.¹⁷⁵ Kepemimpinan fasilitator memiliki pengaruh untuk membangun hubungan komunikasi dua arah yang efektif sehingga bisa mendorong komitmen Bersama.¹⁷⁶

KBRI Kuala Lumpur bergerak sebagai pihak yang menghubungkan *stakeholder* dengan melakukan transparansi informasi kebutuhan sanggar seperti kurikulum nasionalisme dan kebutuhan pembelajaran. Selain itu KBRI Kuala Lumpur melakukan kontrol rutin untuk menjaga kualitas pendidikan di sanggar bimbingan.¹⁷⁷

Melalui monitoring bersama dengan KBRI Kuala Lumpur sebagai pemimpin fasilitator siswa tetap belajar dengan tingkat kehadiran diatas 80% menggunakan peralihan pembelajaran yang fleksible online-offline.¹⁷⁸ Hal ini menunjukkan pemimpin fasilitator yang baik mampu mengubah tantangan menjadi keberhasilan program Pendidikan.

3.3.4 Proses Kolaborasi

Proses kolaboratif yang dilakukan dalam sanggar bimbingan adalah pertemuan rutin yang dilakukan KBRI, PCINU, PCIM, dan komunitas diaspora untuk melakukan evaluasi demi kemajuan program sehingga semua pihak bisa mengetahui kekurangan

¹⁷⁵ Rachmawati et al., “Pemberdayaan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Melalui Pendidikan Nonformal Di Sanggar Bimbingan Kepong.”

¹⁷⁶ Sisca Septiani M Harry Mulya Zein, Syifa Jouhairiah Mahedar, “Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 13893–905, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

¹⁷⁷ Jingga, “Menjamin Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia.”

¹⁷⁸ Tharani Loganathan et al., “Education for Non-Citizen Children in Malaysia during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study,” *PLoS ONE* 16, no. 12 December (2021): 1–19, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259546>.

seperti guru tambahan atau buku pelajaran.¹⁷⁹ Frekuensi koordinasi ini terbukti efektif tercatat melalui rapat *Port Dickson* pada tahun 2019 hingga 2022 sanggar bimbingan berkembang menjadi 32 sanggar bimbingan.¹⁸⁰ Pertemuan yang dilakukan secara rutin menunjukkan dimensi proses kolaboratif Ansell dan Gash yang menekankan dialog berulang untuk menyelaraskan prioritas antar *stakeholder*.¹⁸¹

Dalam proses kolaborasi pemahaman bersama terkait tujuan utama merupakan hal yang penting, dalam hal ini memberikan akses Pendidikan untuk anak *undocumented* PMI melalui sanggar bimbingan. Dengan dilakukannya proses kolaborasi konflik seperti kekurangan dana atau logistik bisa diselesaikan dengan keputusan bersama. seperti pihak PCINU dan PCIM menyediakan ruang belajar sementara KBRI Kuala Lumpur mencari sponsor. hal ini di tunjukkan dengan peningkatan siswa dari 891 orang pada tahun 2022 menjadi 3.000 orang pada 2025.¹⁸² Pembagian peran ini menciptakan kondisi saling ketergantungan yang menjadi ciri dari proses kolaborasi Ansell dan Gash, keberhasilan satu pihak bergantung pada kontribusi pihak lain.¹⁸³

Keberlanjutan program bisa terjaga dengan adanya monitor rutin dan pembagian tugas yang jelas di setiap pihak. PCIM mengelola legalitas dan kurikulum

¹⁷⁹ Rachmawati et al., “Pemberdayaan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Melalui Pendidikan Nonformal Di Sanggar Bimbingan Kepong.”

¹⁸⁰ Nurrahman and Triwahyuni, “Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan.”

¹⁸¹ Ansell and Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”hal 588

¹⁸² Jingga, “Menjamin Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia.”

¹⁸³ Ansell and Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.” Hal 553

dengan izin pemerintah Malaysia, PCINU menangani dokumen administrasi seperti dokumen kelahiran gratis, komunitas diaspora memperluas rekrutmen dan fasilitas di lapangan. Komunikasi dua arah dan pemecahan masalah bersama mampu mengatasi tantangan multistakeholder untuk akses Pendidikan anak *undocumented*.¹⁸⁴

Tantangan utama dalam proses kolaborasi adalah ketidakpastian regulasi Malaysia dan fluktuasi relawan. KBRI merespon dengan strategi diplomasi pendidikan dan fasilitasi program dokumen identitas seperti SPLK dan SBPK, lalu PCIM dan PCINU melakukan inovasi seperti pengembangan jenjang SMP dan program “Sekolah Asuh”, Pola adaptasi ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi bergerak melalui penyesuaian dengan kendala-kendala yang terjadi dan melakukan negosiasi berkelanjutan antar *stakeholder* untuk mengatasi hambatan eksternal.¹⁸⁵

Secara keseluruhan dinamika kolaborasi antara KBRI Kuala Lumpur, PCIM, PCINU, PERMAI, IKABA, IMABA, Pemerintah Malaysia. Menunjukkan bahwa empat dimensi utama model Ansell dan Gash yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif terwujud dalam praktik sanggar bimbingan.¹⁸⁶ Perbedaan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki antar *stakeholder* direspon melalui mekanisme seperti pertemuan rutin dan penyusunan operasional yang efektif, sementara kepemimpinan fasilitatif KBRI memberikan wadah yang

¹⁸⁴ M Harry Mulya Zein, Syifa Jouhairiah Mahedar, “Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance Di Indonesia.”

¹⁸⁵ Ansell and Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.” Hal 588

¹⁸⁶ Ibid hal 550.

memungkinkan adanya pendapat dan masukan dari pengelola sanggar dan komunitas untuk keberlanjutan program. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap relawan dan donasi menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan masih mengalami kesulitan, sehingga perlu adanya dukungan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah Malaysia agar hak pendidikan anak *undocumented* PMI bisa di capai.

